LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KAPUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2021 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi tentang informasi kinerja Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara baik, benar, akuntabel, efesien, responsif terhadap aspirasi masyarakat / publik dan menjadi masukan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2021 serta merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Demikian Laporan Hasil Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang pendidikan.

Cirebon, Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

DAFTAR ISI

			HALAMAN
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR LAMPIRAN			iii
IKHTISAR EKSEKUTIF			1
BAB I	PENDAHULUAN		3
	A	Gambaran Umum Unit Kerja	3
	B	Struktur Organisasi	7
	C	Tugas Pokok Dan Fungsi	8
	D	Lingkungan Strategis	23
	E	Sistematika Penyajian	37
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021		39
	A	Visi - Misi	39
	B	Tujuan	42
	C	Sasaran Strategis	46
	D	Indikator Kinerja Utama (IKU)	56
	E	Penetapan Kinerja Tahun 2021	47
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA	59
	A	Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	59
	B	Pengukuran Dan Analisa Kinerja	61
	C	Pembandingan Capaian Kinerja	74
	D	Akuntabilitas Keuangan	77
	E	Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	78
BAB IV	PENUTUP		112

DAFTAR LAMPIRAN

1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (TARGET DAN REALISASI) TAHUN 2021
2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI) TAHUN 2020 DAN 2021
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI AKUMULASI) TAHUN 2021
4. REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2021) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2021 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2021 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

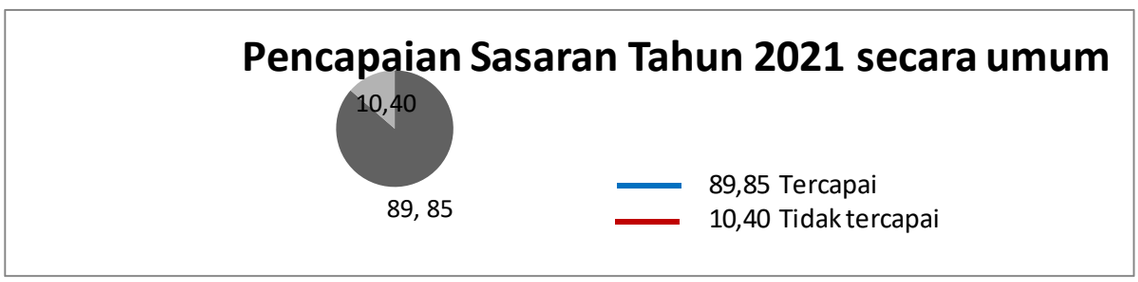

Dari tabel diatas terlihat 89,85% mencapai target/meningkat dan 10,40% tidak mencapai target. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.1.336.159.719.375,- dengan realisasi sejumlah Rp. 1.293.309.343.483,- atau 99,97 %. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 42.850.375.892,-. *(sisa anggaran ini adalah dari belanja gaji dan tunjangan pegawai yang tidak terserap sebesar Rp 37.634.106.928 dan Sisa belanja kegiatan sebesar Rp 4.693.868.151*)

Dalam pengelolaan anggaran tersebut Dinas Pendidikan melaksanakan 2 (dua) Program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran

belanja modal. Pelaksanaan kegiatan Non urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh (20) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.962.041.386.742,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.924.143.651.366,- (96,06%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.37.897.735.376,- (3,94%) yang merupakann sisa anggaran dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan Rp 37.534.506.928,-) dan Rp 363.228.448 merupakan sisa hasil penawaran dan penyesuaian belanja sesuai kebutuhan kegiatan non urusan).

Sementara itu Program Urusan Pendidikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2021 didukung melalui Tiga (3) Program Kegiatan, dengan Enam (6) Kegiatan, dan Empat Puluh Delapan (48) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 374.118.332.633,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 369.165.692.117,- sisa sebesar Rp. 4.952.640.516,- atau tercapai sebesar 98.68%. merupakan sisa haris penawaran fisik dan jasa konsultansi.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2021 dan seterusnya harus terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan *upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah* melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan.

Sumber, Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19620209 199003 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang diadopsi oleh Pemerintah dari konsep UNDP yang menunjukkan laju perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. IPM dibentuk atas dasar 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB). Masing-masing komponen memberikan tingkat kontribusi yang sama terhadap besaran IPM.

Pemerintah Kabupaten Cirebon konsisten menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 IPM Kabupaten Cirebon 76,74 dan pada tahun 2020 IPM 68.75 Indek Point. Untuk setiap kenaikan 1 (satu) angka IPM diperlukan perubahan paradigma, baik dalam aspek manajemen, kinerja aparatur, budaya kerja, dan penyediaan anggaran biaya. Untuk mencapai target IPM tersebut perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya.

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan HLS merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan HLS sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

1. Jumlah penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.296.999 orang, laki-laki 1.163.760 Orang dan perempuan 1.133.239 orang tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan Kelurahan. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data *Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020* sebanyak 728.042 orang terdiri dari laki-laki 374.756 orang dan perempuan 353.286 orang.

Penduduk Usia Prasekolah – Sekolah Menengah Pertama

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	04-06	42.532	39.634	82.166
2	07-12	118.888	110.642	229.530
3	13-15	55.492	52.374	107.866
Jumlah		216.912	202.650	419.562

Sumber data : Disdukcapil 2021

kondisi ekonomi keluarga miskin 247.940 orang atau 11,24% dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.30 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0.24.

2. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

Jumlah Peserta Didik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	35.488	17.879	53.367
2	SD, MI	227.975	472	228.447
3	SMP, SMPT, MTS	114.984	1.575	116.559
Jumlah		378.447	19.926	398.373

Sumber data : Profil Pendidikan 2021/2022

3. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum

adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	3.143	1.439	4.582
2	SD, MI	8.136	243	8.379
3	SMP, SMPT, MTS	8.002	299	8.301
Jumlah		19.281	1.981	21.262

Sumber data : Profil Pendidikan 2021/2022

4. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kwalitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

Jumlah lembaga/Sekolah dan Ruang Kelas

No	Jenjang	Formal	
		Lembaga	R. Kelas
1	PAUD	652	2.205
2	SD, MI	1.641	7.462
3	SMP, SMPT, MTS	341	3.718
Jumlah		2.634	13.385

Sumber data : Profil Pendidikan 2021/2022

5. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten , kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat,

tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan sekolah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

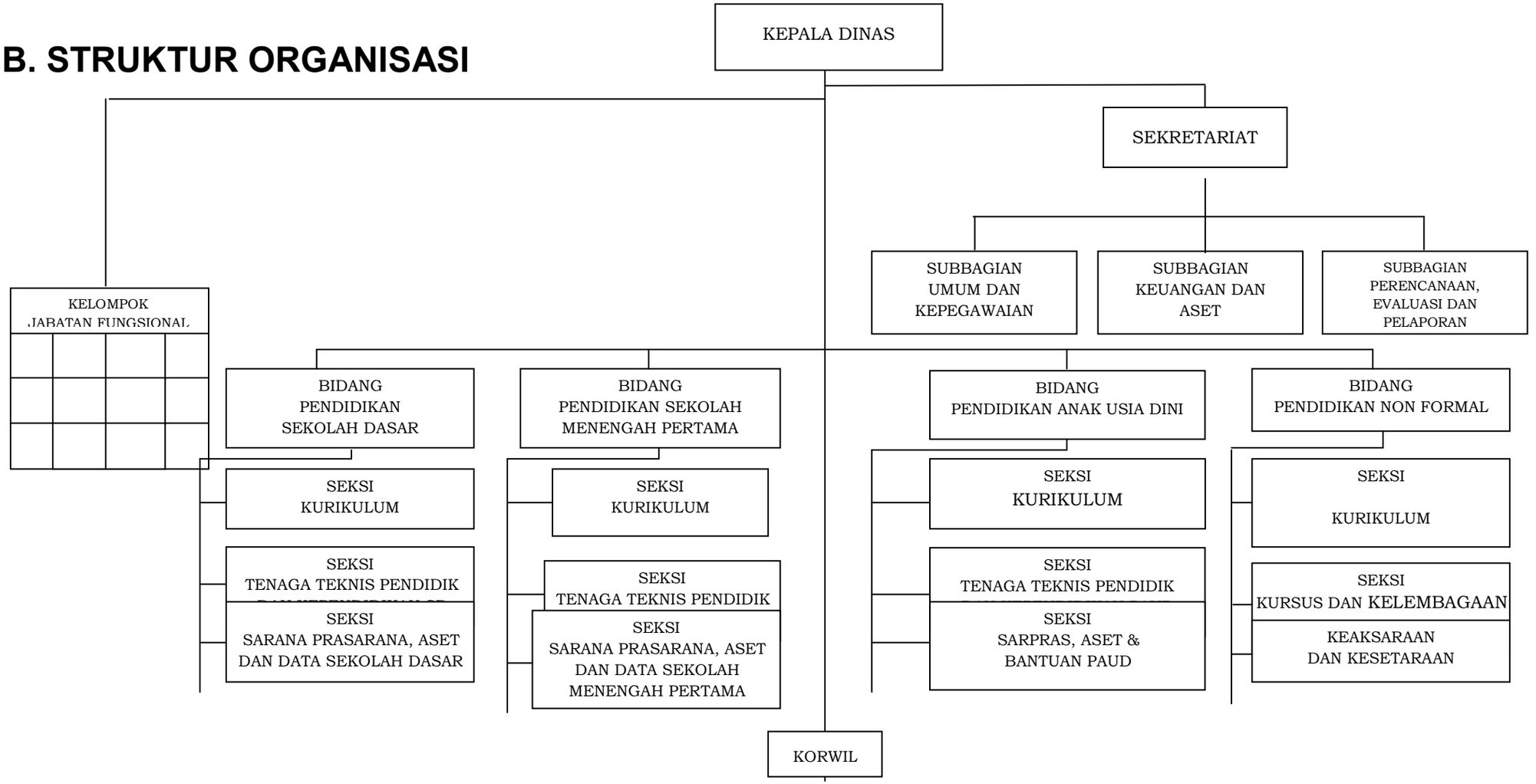

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 Nomor Seri D 13), susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendidikan;
b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendidikan,
c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, (PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal) sesuai aturan yang berlaku;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun;
g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;
e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;
f. pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik;
i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
j. Pengelolaan web site Dinas;
k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Dinas.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan umum dan ketatalaksanaan dinas;
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;
e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

2.2 Subbagian Keuangan dan Aset

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
d. pelaksanaan verifikasi SPP;
e. penyiapan surat perintah membayar;
f. pelaksanaan verifikasi;
g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
h. penyusunan laporan keuangan Dinas;
i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/asset Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.

3.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja (Dinas;
c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;
e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
f. pengelolaan data dan informasi Dinas;
g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;
h. penyusunan profil Dinas;
i. penyusunan laporan Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar);
b. perumusan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar (SD);

g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok mengelola (merumuskan, menyusun dan melaksanakan) kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Dasar.

3.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;
e. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Dasar;
f. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SD;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah dasar;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Dasar
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan sekolah dasar.

3.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan Sekolah Dasar;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD);
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar sesuai kewenangannya ;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar;

3.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
   b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
   c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
   d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan Sekolah Dasar;
   e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
   f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan sekolah dasar;
   g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset sekolah dasar;
   h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana serta penatausahaan/pencatatan aset pendidikan SD.

4. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

(1) Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data SMP);
   b. perumusan rencana dan program kerja/kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama (SMP)
   e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data sekolah menengah pertama(SMP);
g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas pokok menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SMP
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP sesuai kewenangannya;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan SMP;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP.

4.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
   b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
   c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
   d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan SMP;
   e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
   f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan SMP;
   g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset SMP;
   h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMP.

5. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
   c. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan anak usia dini.

5.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunankebijakan teknis kurikulum pendidikan PAUD;
c. pembinaan teknis sarana bermain bagi pendidikan PAUD;
d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan PAUD;
e. pengelolaan kalender pendidikan PAUD;
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PAUD;
g. pembinaan prestasi gugus PAUD;
h. pembinaanminat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD;
i. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa PAUD;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

5.2 Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD;
   b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan PAUD;
   c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD sesuai kewenangannya ;
   d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
   e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
   f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
   g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
   h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD;
   i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan PAUD;
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; dan
   k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD.

5.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;

b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan PAUD;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan PAUD;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset PAUD;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAUD melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan engolah data, mengiventarisasi, memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana/aset PAUD.

6. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

(1) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis kurikulum, keaksaraan dan kesetaraan, dan kursus dan kelembagaan bidang Pendidikan Non Formal;
b) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
c) penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
d) penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Non Formal;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
f) pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Non Formal;
g) pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok mengelola, melaksanakan urusan/kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan Non Formal.

6.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Non Formal;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Non Formal;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
h. pelaksanaan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dan keaksaraan;
i. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
j. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
k. pelaksanaan kompetensi pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
m. pengelolaan kalender pendidikan Non Formal;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Non Formal.

6.2 Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Mempunyai Fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis Kesetaraan dan Keaksaraan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan
d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan keaksaraan dan kesetaraan.

6.3 Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;

b. penyusunan kebijakan teknis kursus dan kelembagaan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kursus dan kelembagaan;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
g. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
h. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian kursus dan kelembagaan;
i. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;
j. pelaksanaan monitoring kompetensi pada lembaga kursus; dan
k. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga kursus dan kelembagaan;

(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Non Formal melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan mengolah data, pembinaan kursus dan kelembagaan di Bidang Pendidikan Non Formal.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS

1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan Pendidikan 2019-2024 tentunya menjadi antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan lima tahun berikutnya yaitu tahun 2024-2029. Beberapa tantangan pembangunan Pendidikan yang dihadapi ke depan adalah:

- Belum meratanya distribusi guru PNS
- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi
- Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah
- Belum sinergisnya pembagian tata kelola Pendidikan antara pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kewenangan.

- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan, terutama di tingkat Pendidikan menengah

Rendahnya minat baca masyarakat,

- Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek- aspek perpustakaan lainnya
- Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi maupun melalui program perpustakaan keliling
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah, untuk bekerja sama dengan komunitas literasi. Seperti forum perpustakan desa/kelurahan atau, forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Dengan beberapa permasalahan yang ada, maka berakibat pada Indek Angka Rata-rata Pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 (Update BPS Jabar Desember 2021) baru pada kisaran 7,10 tahun, ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2021 baru mencapai 12,27 Tahun.

Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 sebesar 12,27 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,27 tahun atau setara dengan Diploma I.

Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan, dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesbilitas Pendidikan belum merata	1 Masih kekurangan Ruang Kelas pada Sekolah Negeri terlebih untuk jenjang SMP
			2 Kemampuan daya siswa yang masih terbatas
			3 Masih ada animo masyarakat harus bersekolah di sekolah Negeri atau Sekolah yang Tekenal (Favorit)
			4 Belum diterapkannya Sistem zonasi pada jenjang Sekolah Dasar
		2 Kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	1 Guru PNS masih kurang pada Sekolah Negeri
			2 Masih banyak guru yang belum bersetifikat pendidik sesuai profesinya
			3 Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak reward atau funishment
			4 Kurang maksimalnya fungsi peran komunitas belajar (KKG/MGMP, KKKSD/MKKSSMP))
			5 Masih banyaknya guru yang belum linear dalam mengampu pembelajaran.
			6 Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah terutama Honorer (Non ASN)
			7 Belum efektifnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Kepala Sekolah (PKKS)
			8 Belum berjalannya sistem Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Capaian SKP tahunan PNS Khususnya.
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum mamadai	1 Kondisi ruang kelas masih banyak yang rusak
			2 Alat praktik dan peraga pembelajaran banyak yang rusak
			3 Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki sarana utama penunjang pembelajaran (Labora- Torium dan Perpustakaan)

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
			4 Standar harga sarana penunjang KBM tinggi
			5 Masih banyaknya sekolah yang belum menyediakan fsilitas fisik ramah anak/murid
		4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah	1 Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
			2 Tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan pengaruh lingkungaan dalam pergaulan anak
			3 Jumlah sekolah yang menerapkan program sekolah inklusi untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus sangat kurang
			4 Masih belum maksimalnya pemberdayaan MBS dalam pengelolaan sekolah
			5 Belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan program kerja sekolah (RKS/RKAS)
			6 Masih banyaknya sekolah dalam manajemen RKS (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindaklanjut) belum sistemik (siklus standar mutu)

1.1.1 Aksesibilitas pendidikan belum merata

a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;
d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan ijazas sebagai syarat diterimanya bekerja;

1.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;
c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

1.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai

a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;

c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

1.1.4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
c) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
f) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN" dan **Misi** :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya "Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Kabupaten Cirebon Sejahtera "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon Agamis "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika"
4. Kabupaten Cirebon Maju "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"
5. Kabupaten Cirebon Maju "Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional"

dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif

mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya yang tertera pada misi ke **1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

1.3 Talaahan Rencana Strategis

Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam lima tahun kedepan visi Gubernur Jawa Barat yakni **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "**. Makna dari Visi tersebut adalah Jabar Juara Lahir Batin bahwa pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi adalah bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan Publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makna Kolaborasi adalah perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk mewujudkan Jabar Juara maka dilakukan beberapa misi, salah satunya aspek misi dalam ruang lingkup pendidikan. Misi tersebut

"Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif". Misi ini diarahkan menghadirkan pelayanan publik berkualitas hingga ujung batas wilayah. Agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati Pendidikan dan kesehatan. Perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya untuk dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari misi tersebut melahirkan beberapa program sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yakni Menghadirkan Sekolah Jabar yaitu Inovasi Layanan Pendidikan Menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses Layanan Pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lainnya. Melalui layanan Pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

1.3.1 Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya

aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

a). Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dalam misi 1 "**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi"**. Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.

d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam

pembangunan di bidang pendidikan.

b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.

c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.

d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

1.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencaup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah berakhirnya periode Rencana Strategis Bidang Pendidikan dengan fokus penguatan layanan pendidikan, pada tahapan selanjutnya yakni periode 2019-2024, fokus pembangunan pendidikan pada layanan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana serta tatakelola pendidikan jenjang pendidikan pra sekolah, SD dan SMP serta pendidikan non formal. Untuk menentukan langkah penanganan pembangunan pendidikan perlu adanya identifikasi isu strategis yang tepat dan menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.5.1 Melek huruf latin dan Al-Qur'an

Tingkat buta huruf Alquran di Indonesia terbilang tinggi. Hasil riset dari Institut Ilmu Alquran (IIQ) akhir pekan lalu mencatat sekitar 65 persen masyarakat Indonesia buta huruf Alquran. Begitu pula di Kabupaten Cirebon meski jumlah Pesantren tidak sedikit namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat melek huruf Al-Qur'an (Huruf arab) masih rendah.

Isu Strategis ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan. Sungguh sangat mengejutkan dan perlu dibahas dalam penyusunan program khususnya institusi terkait serta masyarakat pada umumnya melalui pendidikan informal (didalam), formal (di sekolah) maupun non formal (Pendidikan oleh masyarakat). Peran aktif masyarakat sangat diperlukan seperti melalui Dewan masjid dan lain-lain. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat melek Alquran Kabupaten Cirebon adalah pencanangan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji). Program tersebut terinspirasi dari budaya sebagian besar masyarakat Muslim tempo dulu, yang kerap melakukan amalan tadarus Al Qur'an tiap ba'da shalat Maghrib.

Kemiskinan dan kebodohan ibarat lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Beruntung di Kabupaten Cirebon hanya sekitar 10% masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian bukan berarti berbanding lurus dengan tingkat melek huruf latin. Masih ada sebagian pendududuk yang masih belum melek huruf dikarenakan himpitan ekonomi memaksa mereka lebih mementingkanusaha pemenuhan kebutuhan hidup daripada peningkatan sumberdaya manusia.

Selain itu sebagian besar dari mereka sudah termasuk usia lansia sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran disamping mereka menganggap bahwa melek huruf tidak merupakan kebutuhan inti untuk menjalani kehidupannya.

1.5.2 Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru, karena guru saat ini haruslah memiliki standar kompetensi yang dapat menjadikan dunia pendidikan lebih bermutu dan berkualitas. Belum semua guru memiliki seluruh standar kompetensi. Hal ini akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan jika kondisi ini tetap berlangsung maka kondisi mutu pendidikan lama kelamaan akan menjadi terpuruk. Standar kompetensi dimaksud adalah:

- Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi: Mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran

- Kompetensi Kepribadian ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai

pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber inspirasi posirif bagi para peserta didiknya.

- Kompetensi Sosial ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas.

- Kompetensi Profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembalajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan.

1.5.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Cirebon masih belum terpenuhi atau belum memenuhi SPM Pendidikan. Selain itu kondisinya sudah banyak yang rusak dimakan usia dan diperparah dengan pendistribusiannya yang belum merata.

Mestinya salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki faslitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

1.5.4 Manajeman Pengelolaan Pendidikan

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tatakelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainaya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.
2. Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.
3. Tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Unit Kerja

Dalam gambaran umum unit kerja ini menerangkan tentang keadaan dinas pendidikan

B Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dinas pendidikan

C Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi disini membahas tengang:perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, sarana dan prasarana serta fungsional;pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas; penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D Lingkungan Strategis

Memuat tentang lingkungan Strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal.

E Sistematika Penyajian

Tentang peyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan secara garis besar.

BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

A Visi - Misi

B Tujuan

C Sasaran Srategis

D Indikator Kinerja Utama (IKU)

B Penetapan Kinerja Tahun 2021

Membahas tentang penetapan kinerja tahun 2021 sebagai pedoman dalam menjalankan kinerja dibidang pendidikan di tahun 2021

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara

membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

B Pengukuran dan dan Analisa Kinerja

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya

C Pembandingan Capaian Kinerja

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja tahunan yang direncanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

D Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

E Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2021.

A. VISI - MISI

V I S I

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati Bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalian, pengerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian Visi dalam pembangunan di bidang pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap dunia pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”**

M I S I :

Guna pencapaian visi tersebut diatas , Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengampu pada misi ke 2 (dua) misi Kabupaten Cirebon yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”

Adapun penjelasan misi tersebut terhadap pembangunan pada bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Pertama, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik.

Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia. Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984

dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurkulum 2013 (KURTILAS).

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kabijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten.
Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yang dimilikinya.

Ketiga, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan
Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

Keempat, Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan
Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

B. TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”.

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2019- 2024) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan. Upaya yang dilakukan :

1. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik**

   Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

2. **Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan**

   Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil peserta didik US/UN SD dan SMP masih rendah.

   Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis

pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

3. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan**

   Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan**

   Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Pengertian Cerdas dan Kompetitif

Cerdas dan Komprehensif	
Multiple Intelegence	• Kecerdasan Verbal Beraktualisasi diri melalui kecerdasan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna, ide atau gagasan-gagasan. • Kecerdasan Matematis Beraktualisasi diri melaui kecerdasan penggunaan logika untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasi-operasi matematika. • Kecerdasan Visual Spasial

Cerdas dan Komprehensif	
Kompetitif	Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah bentuk dan ruang tiga dimensi. • Kecerdasan Kinestetis – Fisik Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah fisik. • Kecerdasan Musikal Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan sensitivitas terhadap pola titi nada, melodi, ritme dan nada. • Kecerdasan Inter – Personal Beraktualisasi diri melalui pemahaman dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain (Learning to life together). • Kecerdasan Intra – Personal Beraktualisasi diri untuk memahami diri sendiri dan pengendalian diri untuk menumbuhkan/memperkuat keimanan dan ketaqwaan. • Kecerdasan Natural Beraktualisasi diri melalui kemampuan mengobservasi pola – pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia. • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, bersahabat dengan perubahan, inovatif, menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebin dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai

investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Motifasi merupakan alat pemicu untuk medapat suatu yang diharapkan. Tinggi rendahnya motifasi akan langsung berdampak pada tingkat keberhasilan dan prestasi peserta didik dalam berbagai hal. Motifasi perlu dipupuk setiap saat oleh pendidik, orang tua, masyarakat dan oleh peserta didik itu sendiri, karena motifasi tidak serta merta hadir tanpa ada penyebab, harapan dan cita-cita yang akan dicapai.

Motifasi belajar tidak hanya ditumbuh kembangkan pada peserta didik semata melainkan pada semua lini yang bersinggungan dengan pengelolaan pendidikan karena diantara keduanya dapat saling mempengaruhi dan saling memberi energi positif dalam rangka mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Banyak kesempatan dan ruang waktu utuk membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik baik pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar maupun dalam kesempatan lain dalam situasi formal maupun nonformal. Kebersamaan yang intensif antara peserta didik denga pendidik melahirkan situasi yang strategis untuk memompa motifasi belajar siswa sehingga dapat mengasah kecerdasan sebagai modal dasar bagi keberhasilan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Bermacam-macam cara dapat digunakan untuk meningkatkan motifasi belajar peserta didik, dapat secara langsung maupun tidak langsung, pada saat sendiri ataupun berkelompok. Sering motifasi belajar timbul setelah peserta didik melihat, mendengar ataupun merasakan sendiri sesuatu hal yang dapat merubah sikap mental dalam

memberikan apresiasi terhadap pentingnya kecerdasan bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidup sehingga dapat bersaing pada era global.

C. SASARAN DAN STRATEGI

1. SASARAN

1.1 **Meningkatnya Kemempuan Membaca**

Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang paling utama dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami pesan yang disampaikan sebuah tulisan, keterampilan membaca sangat diperlukan.

Keterampilan membaca siswa merupakan dasar yang menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik seringkali mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam menangkap dan memahami informasi yang terdapat dalam buku-buku pelajaran, ataupun sumber-sumber penunjang belajar lainnya siswa harus mampu membaca dengan baik. Masih banyak siswa pada satuan pendidikan yang belum lancar membaca, bahkan sama sekali belum bisa membaca dengan baik hal ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan yang harus segera ditangani dan mendapat perhatian berbagai pihak.

Salah satu program dalam meningkatkan Keterampilan membaca siswa adalah adanya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang menjadi populer semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Program Peningkatan Keterampilan Membaca melalui Program Klinik Baca adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi kepada siswa yang memiliki kendala dalam keterampilan membaca;
2. Memeberikan motivasi kepada siswa agar memiliki keinginan dan kemauan untuk meningkatkan keterampilan membaca;
3. Terwujudnya Program Melek Huruf melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di Kabupaten Cirebon (tujuan jangka menengah/1 tahun)
4. Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di seluruh sub rayon (gugus) Kabupaten Cirebon sesuai

standar membaca pemahaman dengan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) mencapai 140 – 175 KPM (tujuan jangka panjang/2 tahun);

1.2 Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu factor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

1.3 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru

hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

1.4 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

1.5 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

a. SAKIP Dinas Pendidikan
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang professional
c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian SNP
d. Sistim Informasi Manajeman Dinas Pendidikan pengelolaan data.
e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. STRATEGI

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019--2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan

pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu

2.1.1. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Strategi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata, dan mengembangkan pendidikan karakter.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Apabila diamati secara seksama, Guru Negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan adalah membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;

b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;

c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;

d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

2.1.2. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

2.1.3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

2.1.4 Peningkatan layanan tatakelola pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien

diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

2.1.4. Peningkatan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

Stategi yang diterapkan rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional anakuntabel (Reformasi Birokrasi).

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	22,44 Prosen	22,58	22,71	22,85	22,99
1.1.1.		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	96,00 Prosen	96,58	97,16	97,74	98,32
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SD	76,00 Prosen	76,46	76,91	77,38	77,84
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SMP	59,50 Prosen	63,30	67,10	70,90	74,70
1.1.2.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,78 Prosen	6,88	6,98	7,08	7,18
1.1.3.		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52 Prosen	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.4.		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,30 Point	78,35	78,42	78,45	78,50
			Harapan Lama Sekolah	0,00 Prosen	0,00	0,00	0,00	0,00

E. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON ESELON II (PIMPINAN SKPD)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan		Non Kumulatif	Meningkat	BPS dan Diskominfo	22.58 Poin	22.58 Poin
1.1.1.	Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	*Jml. Penduduk (usia diatas* 15 tahun) /ang b/sa *menulis* ^qq *Jml. Penduduk usia* 15 *tahun ke atas*	Non Kumulatif	Meningkat	BPS / Infokom	96.58 Prosen	96.58 Prosen
		Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	*Jml. Siswa SD yang bisa baca menulis huruf Al Qur'an* ^qq *Jml. Seluruh Siswa SD* x	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	76.46 Prosen	76.46 Prosen
1.1.2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	*(thn) RLS - Pen(iu(iuk U5a > 15 Th X Lama Pendidikan yang dihabiskan*) xiOO Jml. Penduduk >* 15 *Th Yang sedang bersekolah atau telah beriijazah **)*	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	6.88 Tahun	6.88 Tahun
1.1.3.	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	n *E] HLS'a=FKxE-£*	Non Kumulatif	Meningkat	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12.67 Tahun	12.67 Tahun
1.1.4.	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Manajemen Bebasisa Sekolah	*Jml. Sekolah Yang Menerapan MBS .,.nn MdS —* . XI00 *Jml. Sekolah yang ada*	Non Kumulatif	Meningkat	Disdik	100 Prosen	100 Prosen
		Indek Kepuasan Masyarakat	*Jml. Total dari persepsi nilai perunsur IKM =------------, , ------r:-------XNilai Penimbang Total Nilai yang tensi*	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	78.35 Point	78.35 Point

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.812.387.100,00	3.865.851.200,00	Sumber Dana: ,DTU-DAU
1.1.2.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	8.952.596.700,00	265.721.610.283,00	Sumber Dana: ,DAK Non Fisik-BOP PAUD,DAK Non Fisik-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-BOS Reguler,DAK Non Fisik-BOS Reguler,DTU-DAU
1.1.2.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	163.600.000,00	124.960.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.452.383.356,00	102.647.842.650,00	Sumber Dana: ,BanKeu Prov,BanKeu Prov, DAK Fisik B.Pddk Reg-SD, DTU-DAU,BanKeu Prov, DTU-DAU,DAK Fisik B.Pddk Reg-PAUD,DAK Fisik B.Pddk Reg-PAUD, DTU-DAU,DAK Fisik B.Pddk Reg-SD,DAK Fisik B.Pddk Reg-SD, DTU-DAU,DAK Fisik B.Pddk Reg-SMP,DAK Fisik B.Pddk Reg-SMP, DTU-DAU,DAK Non Fisik-BOP Pendidikan K,DTU-DAU
1.1.3.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	105.917.200,00	0,00	Sumber Dana:
1.1.3.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.957.811.400,00	1.445.750.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.013.919.505.742,00	962.188.526.742,00	Sumber Dana: ,DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TPG PNSD, DTU-DAU, PAD,DTU-DAU
1.1.4.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	373.981.200,00	260.717.600,00	Sumber Dana: ,DTU-DAU
J U M L A H		**1.057.738.182.698,00**	**1.336.255.259.375,00**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab atas kebutuhan informasi perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Adapun hasil pengukuran kinerja (PK) dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

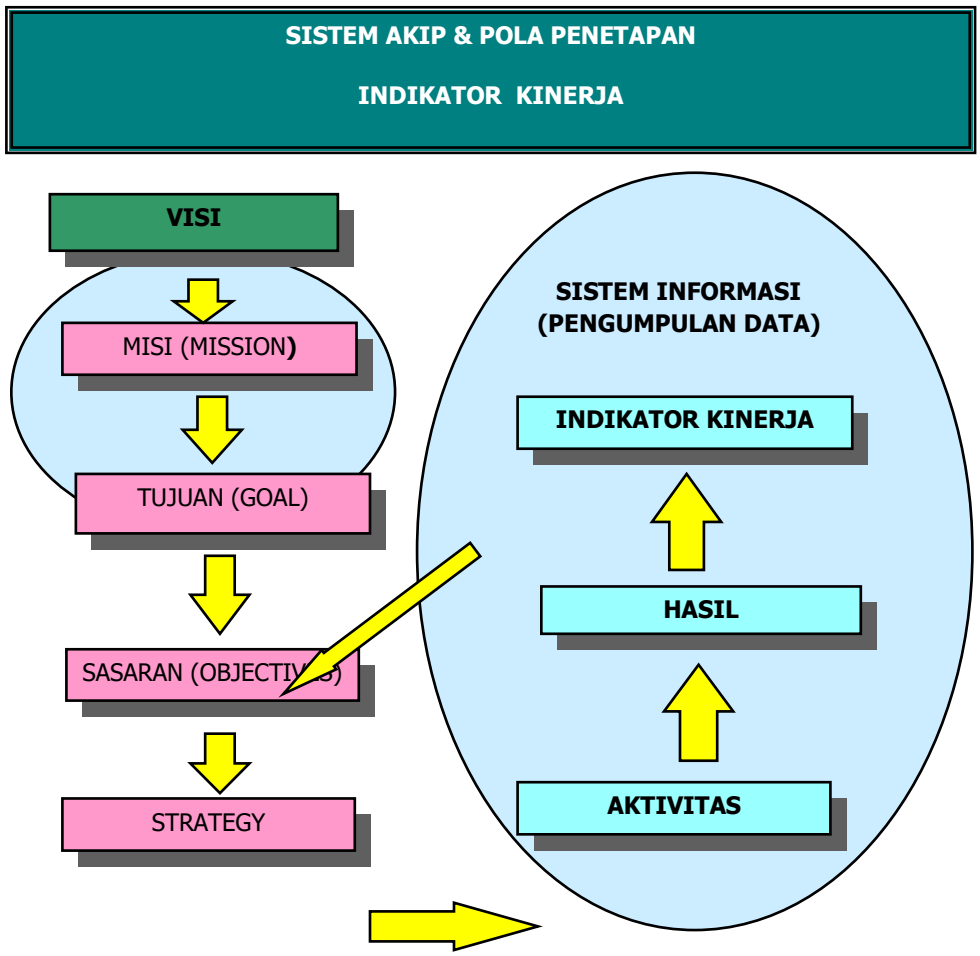

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Ringkasan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berupa pencapaian sasaran, sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan pada tahun 2019-2024 sebanyak 4 (Empat) buah sasaran dengan 40 (Empat Puluh) indikator, yang terinci sebagai berikut :

- 35 target tercapai
- 5 target tidak tercapai

Pada tahun anggaran 2021 sebanyak 4 sasaran telah dilaksanakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2021 baik. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi / tidak dapat menyesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh Provinsi. Disamping itu masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti masih rendahnya mutu pendidikan, kualitas maupun kwantitas tenaga pendidik, sarana prasarana serta biaya pendidikan belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran (Pengukuran Pencapaian Kegiatan /PPK)

2. Rincian Kinerja

a. MENINGKATNYA KEMAMPUAN MEMBACA

Meningkatnya Kemampuan Membaca ditandai dengan tingkat capaian Angka Melek Huruf dan Melek Huruf Al-Qur'an.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA MELEK HURUF

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Jumlah Penduduk ≥ Tahun Dapat Membaca	96,58	99,73	103,26
	Jml. Rata-rata	96,58	99,73	103,26

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Angka Melek Huruf pada tahun 2021 sebesar 96,58% dengan realisasi mencapai 99,73%. dari Jumlah Penduduk ≥ 15 Tahun Dapat Membaca. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai hal ini ditunjang dengan Program Pendidikan Non Formal dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional yang dikelola oleh masyarakat melalui lembaga PKBM dengan warga belajar penduduk yang buta aksara.

2. MELEK HURUF AL-QUR'AN

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	76,46	76,46	100,00
2	SMP	63,30	63,30	100,00
	Jml. Rata-rata	69,88	69,88	100,00

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Melek Huruf Al-Qur'an SD pada tahun 2021 sebesar 76,46 % dengan realisasi mencapai 76,46 %. dari jumlah siswa SD sebanyak 197.340 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

Target Melek Huruf Al-Qur'an SMP sebesar 63,30 % dengan realisasi mencapai 63,30 % dari jumlah seluruh siswa SMP sebanyak 81.528 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik Atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten

Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji. dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

b. MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan ditandai dengan tingkat capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah, APK, APM, Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas dan Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Jumlah Tahun Ijazah Penduduk ≥ 15 Tahun	6,88	7,10	103,20
	Jml. Rata-rata	6,88	7,10	103,20

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan variabel RLS menggunakan angka usia penduduk yang berumur 25 tahun keatas yang memiliki ijazah terakhir atau tingkat pendidikan terakhir. Target Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2021 sebesar 6,88 tahun dengan realisasi capaian rata-rata Kabupaten sebesar 7,10 tahun, capain ini meningkat . Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 6,92 tahun, hal ini karena adanya dukungan penyelenggaran pendidikan non formal Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA dan merupakan program prioritas dalam mendongkrak peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PAUD	68,41	58,49	85,50
2	SD sederajat	100,00	99,53	99,53
3	SMP sederajat	100,00	108,06	108,06
	Jml. Rata-rata	89,47	88,69	97,70

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target APK PAUD pada tahun ini sebesar 68,41% atau jumlah siswa PAUD sebanyak 33.136 siswa sedangkan realisasinya mencapai 58,49% . Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik walaupun masih terdapat anak usia dini yang belum mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Kondisi demikian terjadi karena masih ada masyarakat yang belum mau menyekolahkan anaknya ke jenjang PAUD/TK dengan alasan nanti saja sekalian masuk Sekolah Dasar (SD) karena merasa kerepotan.

Target APK SD pada tahun ini sebesar 100,00% atau jumlah siswa SD sebanyak 197.340 siswa sedangkan realisasinya mencapai 99,53% . Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik Atau Tercapai walaupun belum berada pada posisi angka ideal, karena masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah menjadi siswa SD dan lebih dari 12 tahun masih berada pada jenjang sekolah dasar. Kondisi demikian terjadi pada beberapa tahun terahir dikarenakan prioritas program pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar sembilan tahun.

Target APK SMP sebesar 100,00% atau jumlah seluruh siswa SMP sebanyak 81.528 siswa sedangkan realisasinya mencapai 108,06%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik walaupun belum berada pada posisi angka ideal, karena masih terdapat anak usia kurang dari 13 tahun sudah menjadi siswa SMP dan lebih dari 13 tahun masih berada pada jenjang SMP. Kondisi demikian dikarenakan prioritas program pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar sembilan tahun. dikarenakan adanya interfensi program bantuan dana seperti BOS , bea siswa dan lain-lain.

3. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD sederajat	100,00	90,53	90,53
2	SMP sederajat	98,89	87,83	88,82
	Jml.rata-rata	99,45	89,18	89,68

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target APM SD sebesar 100,00% atau jumlah siswa usia 7-12 sebanyak 177.029 siswa sedangkan realisasinya mencapai 90,53%. Hal ini menggambarkan capaian kinerja cukup baik Atau Tercapai walaupun masih terdapat anak usia 7 - 12 tahun masih belum atau tidak sekolah lagi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan lain-lain.

Target APM SMP 98,89 % atau jumlah siswa usia 13-15 tahun sebanyak 60.228 siswa sedangkan realisasinya baru mencapai 87,83%. Hal ini menggambarkan capaian kinerja cukup baik atau Tercapai walaupun masih terdapat anak usia 13-15 tahun masih belum atau tidak sekolah lagi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan lain-lain.

4. RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	22,00	20,00	110,00
2	SD	24,00	27,00	95,55
3	SMP	32,00	31,00	101,10
	Jml. rata-rata :	26,00	26,00	102,22

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang TK sebesar 22,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 20,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai. Semua kecamatan telah mencapai target.

Target Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang SD sebesar 24,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 27,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai. Semua kecamatan telah mencapai target.

Target Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang SMP sebesar 32,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 31,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan kriteria baik. Ada beberapa kecamatan yang belum mencapai target, Kondisi demikian terjadi di beberapa sekolah terutama SMP swasta dan SMP yang berada di daerah terpencil dan terpencar serta daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah.

5. Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PKBM	80	75	93,75
2	LKP	70	91	130,00
	Jml. Rata-rata :	75	83	111,88

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal pada PKBM sebesar 80 sedangkan realisasinya sebesar 75, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal pada LKP sebesar 70 sedangkan realisasinya sebesar 91, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

c. MENINGKATNYA MUTU DAN RELEFANSI PENDIDIKAN

Peningkatan mutu, relefansi pendidikan ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Lulusan (AL), Angka Melanjutkan, Guru Layak Mengajar, Rasio Guru Per Siswa, Ketersediaan Ruang Kelas Baik, Terakreditasi.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan variable yang berpengaruh terhadap dimensi pendidikan, yang didefinisikan sebagai lamanya bersekolah (dalam tahun). Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 memiliki nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,27. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 12,25. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2021 12,27 menunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon memiliki harapan bersekolah sampai 12 tahun atau setara dengan tamat SMA, hal ini sesuai dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah. *Sumber data BPS Kabupaten Cirebon*

2. Angka Putus Sekolah (APS)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	0,01	0,04	400,00
2	SMP	0,19	0,12	63,16
	Jml. Rata-rata :	0,10	0,08	231,58

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2021/2022

Target APS pada jenjang SD sebesar 0,01% sedangkan realisasinya sebesar tersebar 0,04% pada 930 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Lemahabang, Karangwareng, Pasaleman dengan jumlah APS sebanyak 0.1%, merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain dimana kecamatan lain telah mencapai 0%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau tercapai, karena bisa menekan angka putus sekolah dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

Target APS pada jenjang SMP sebesar 0,19% sedangkan realisasinya sebasar 0,12% tersebar pada 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Pabuaran jumlah APS sebanyak 0,90% merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan dibeberapa kecamatan telah mencapai 0%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau tercapai karena bisa menekan angka putus sekolah dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

3. Angka Lulusan (AL)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	100,00	99,30	99,30
2	SMP	99,98	97,58	97,60
3	Paket A Setara SD	85,00	88,50	104,12
4	Paket B Setara SMP	70,04	88,00	125,64
5	Paket C Setara SMA	80,50	88,89	110,42
6	Lembaga Kursus dan pelatihan	100,00	100,00	100,00
	Jml rata-rata :	89,25	93,71	106,18

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2021/2022

Target AL pada jenjang SD sebanyak 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 99,30% tersebar pada 930 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100% Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik.

Target AL pada jenjang SMP sebanyak 99,98% sedangkan realisasinya sebesar 97,58% tersebar pada 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100% Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik.

Target AL pada jenjang Paket A Setara SD sebanyak 85,00% sedangkan realisasinya sebesar 88,50% tersebar pada 75 lembaga PKBM Pengelola Paket A setara SD yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik.

Target AL pada jenjang Paket B Setara SMP sebanyak 70,04% sedangkan realisasinya sebesar 88,00% tersebar pada 75 lembaga PKBM Pengelola Paket B setara SMP yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik

Target AL pada jenjang Paket C Setara SMA sebanyak 80,50% sedangkan realisasinya sebesar 88,89% tersebar pada tersebar pada 75 lembaga PKBM Pengelola Paket C setara SMA yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik

Target AL pada jenjang Lembaga Kursus dan Pelatihan sebanyak 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 100,00% tersebar pada tersebar pada 75 lembaga LKP Pengelola Kursus dan Pelatihan yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan sudah mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik

4. ANGKA MELANJUTKAN

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD ke SMP	100,00	113,32	113,32
	Jml. Rata-rata :	100,00	113,32	113,32

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2021/2022

Target Angka Melanjutkan pada jenjang SD ke SMP sebesar 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 113,32% tersebar pada 930 SD Negeri / swasta dan 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau Tercapai.

5. GURU LAYAK MENGAJAR

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	72,90	76,84	105,40
2	SD	97,60	97,60	100,00
3	SMP	98,80	98,50	99,70
	Jml. Rata-rata :	89,77	90,98	101,70

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Guru layak mengajar pada jenjang TK sebanyak 72,90% sedangkan realisasinya sebesar 76,84% tersebar pada 309 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik atau Tercapai.

Target Guru layak mengajar pada jenjang SD sebanyak 97,60% sedangkan realisasinya sebesar 97,60% tersebar pada 930 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik atau Tercapai.

Target Guru layak mengajar pada jenjang SMP sebesar 98,80% sedangkan realisasinya sebesar 98,50% tersebar pada 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria baik atau tercapai.

6. RASIO GURU PER SISWA

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	15,00	11,00	73,33
2	SD	20,00	21,00	105,00
3	SMP	20,00	16,00	80,00
	Jml. rata-rata :	18,33	16,00	86,11

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2021/2022

Target Rasio guru per siswa pada jenjang TK sebesar 1:15 sedangkan realisasinya sebesar 1:11 tersebar pada 309 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Rasio guru per siswa pada jenjang SD sebesar 1:20 sedangkan realisasinya sebesar 1:21 tersebar pada 930 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Rasio guru per siswa pada jenjang SMP sebesar 1:20 sedangkan realisasinya sebesar 1:16 tersebar pada 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah baik dikarenakan ada kebijakan untuk menunjuk tenaga honorer untuk memenuhi kekurangan guru baik di jenjang SD maupun SMP.

7. KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	60,72	93,20	153,49
2	SD	70,84	64,58	91,16
3	SMP	81,00	70,79	87,40
	Jml. Rata-rata :	70,85	76,19	110,68

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2021/2022

Target ketersediaan ruang kelas baik pada jenjang TK sebesar 60,72% sedangkan realisasinya sebesar 93,20% tersebar pada tersebar pada 309 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target ruang kelas baik pada jenjang SD sebesar 70,84% sedangkan realisasinya sebesar 64,58% tersebar pada 930 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Waled 46,01% merupakan angka Terendah bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan Kecamatan Sedong 86,82% merupakan angka Tertinggi. Dalam hal peningkatan mutu sarana Ruang Kelas Sekolah baik masih belum mencapai harapan yang ditargetkan, hal ini disebabkan masih kurang seimbangnya antara alokasi anggaran untuk rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah dengan jumlah Ruang Kelas yang rusak yang setiap waktu bertambah dikarenakan faktor alam, lingkungan dan usia bangunan sendiri.

Target prosentase ruang kelas baik pada jenjang SMP sebesar 81,00% sedangkan realisasinya sebesar 70,79% tersebar pada 205 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Gempol merupakan kecamatan dengan capaian 100,00 % merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan kecamatan Panguragan 12,20 % merupakan angka terendah. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai, bahkan ada kenaikan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

8. LEMBAGA PENDIDIKAN/SEKOLAH TERAKREDITASI

No	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	75,00	72,59	96,79
2	SD	98,00	97,60	99,59
3	SMP	88,00	89,80	102,05
	Jml.Rata-rata :	87,00	86,66	99,48

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2021/2022

Target Terakreditasi jenjang pendidikan TK sebesar 75,00% sedangkan realisasinya 72,59%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria belum tercapai karena masi terdapat beberapa sekolah baru yang belum melakukan akreditasi terutama TK swasta.

Target Terakreditasi jenjang pendidikan SD sebesar 98,00% sedangkan realisasinya 97,60%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria belum tercapai karena masi terdapat beberapa sekolah baru yang belum melakukan akreditasi terutama SD swasta.

Target Terakreditasi jenjang pendidikan SMP sebesar 88,00% sedangkan realisasinya 89,80%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria sudah tercapai karena sekolah baru sudah melakukan akreditasi terutama SMP swasta.

d. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan.

Tata Kelola Akuntabilitas dapat ditandai dengan adanya efisiensi internal sekolah dimana dapat digambarkan melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme para pelaksana dalam mendorong terlaksananya manajerial yang tangguh dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil sesuai target. Manajemen berbasis sekolah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat saat ini di mana pendidikan sedang menjadi primadona dan menjadi sorotan hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga perlu dibangun transparansi di semua lini. Secara terperinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	80,27	81,02	100,93
2	SMP	77,46	80,00	103,28
	Jml.Rata-rata :	78,87	80,51	102,11

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SD 80,27 Point sedangkan realisasinya mencapai 81,02 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah baik atau tercapai.

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SMP 77,46 Point sedangkan realisasinya mencapai 80,00 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai.

2. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PAUD	100	100	100
2	SD	100	100	100
3	SMP	100	69,46	69,46
	Jml. rata-rata :	100	100	100

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada institusi sekolah untuk mengatur sekolah sesuai dengan potensi, kebutuhan dan tuntutan sekolah yang bersangkutan. Sekolah diberi otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai program sekolah dengan berbagai implikasinya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Di Kabupaten Cirebon seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta telah melaksanakan MBS dengan baik meskipun masih terus menerus perlu peningkatan kualitasnya. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan menyeluruh.

C. PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 4 (empat) tahun yang direncanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada uraian dibawah ini

N0.	INDIKATOR KINERJA KUNCI / SPM Standar Nasional		TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN (IKK)				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISIS
			TARGET 2021 (Tahun n-2)	TARGET 2022 (Tahun n-1)	TARGET 2023 (Tahun n)	TARGET 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	
(1)	SASARAN	INDIKATOR KUNCI								(12)
1		**1.1.1.1.1.1. Angka melek huruf**	**96,58%**	**97,16%**	**97,74%**	**98,32%**	**99,73%**	**97,16%**	**97,74%**	
	1.1.1.1.1. Meningkatnya kemampuan membaca	**1.1.1.1.1.2. Angka melek huruf Al Qur'an**								
		SD (%)	**76,46**				**76,46**			
		SMP (%)	**63,30**				**63,30**			
2	1.1.1.1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	**1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**6,88**	**6,98**	**7,08**	**7,18**	**7,10**	**6,98**	**7,08**	
		1.1.1.1.2.1. Angka Partisipasi Kasar								
		APK PAUD %	**68,41**	**68,82**	**69,23**	**69,65**	**58,49**	**68,83**	**69,23**	
		APK SD/MI %	**100**	**100**	**100**	**100**	**99,53**	**100**	**100**	
		APK SMP/MTs %	**100**	**100**	**100**	**100**	**108,06**	**100**	**100**	
		1.1.1.1.2.2. Angka Partisifasi Murni								
		APM SD/MI %	100	100	100	100	90,53	100	100	
		APM SMP/MTs %	**98,89**	**99,49**	**100**	**100**	**87,83**	**99,49**	**100**	
		1.1.1.1.2.3. Rasio Ketersediaan Siswa per Kelas :								
		TK (%)	1:22	01:20	01:17	01:15	01:20	01:20	01:17	
		SD	**01:24**	**01:22**	**01:21**	**01:20**	**01:27**	**27**	**01:21**	

		SMP	**01:32**	**01:30**	**01:29**	**01:28**	**01:31**	**31**	**01:29**	
		1.1.1.1.2.3. Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal								
		PKBM	**80**	**90**	**95**	**100**	**75**		**95**	
		LKP	**70**	**80**	**85**	**100**	**91**		**85**	
3	1.1.1.1.3. Meningkatnya mutu dan relefansi pendidikan	**1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah**	**12,67**	**12,82**	**12,97**	**13,12**	**12,27**	**12,82**	**12,97**	
		1.1.1.1.3.1. Angka Putus Sekolah :								
		APS SD %	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,01**	**0,00**	
		APS SMP %	**0,19**	**0,15**	**0,10**	**0,00**	**0,12**	**0,15**	**0,10**	
		1.1.1.1.3.2. Angka Lulusan :								
		SD (%)	100	100	100,00	100,00	99,3		100,00	
		SMP (%)	**99,98**	**99,99**	100,00	100,00	**97,58**	**99,99**	100,00	
		Paket A setara SD (%)	85	90,00	95,00	98,00	88,50	90,00	95,00	
		Paket B setara SMP (%)	70,04	70,04	71,30	71,70	88,00	70,04	71,30	
		Paket C setara SMA (%)	**80,5**	**81**	**81,40**	**81,90**	**88,89**	**81**	**81,40**	
		Lembaga Kursus dan Pelatihan (%)	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00	
		1.1.1.1.3.3. Angka Melanjutkan :								
		SD ke SMP (%)	**100**	**113,32**	**100,00**	**100,00**	**113,32**	**113,32**	**100,00**	
		2.1.1.1.1.1. Guru Layak Mengajar :								
		TK %	**72,90**	**73,00**	**73,80**	**74,30**	**76,84**	**73,00**	**73,80**	
		SD (%)	**97,60**	**98,00**	**98,80**	**99,30**	**97,60**	**98,00**	**98,80**	
		SMP (%)	**98,80**	**99,00**	**100,00**	**100,60**	**98,50**	**99,00**	**100,00**	

		2.1.1.1.1.1. Rasio Guru per Siswa :								
		TK	1:15.7	01:10	01:10	01:10	01:11	01:10	01:10	
		SD	**20**	**20**	**20**	**20**	**01:21**	**20**	**20**	
		SMP	**20**	**20**	**20**	**20**	**01:16**	**20**	**20**	
		3.1.1.1.1.1. Ketersediaan Ruang Kelas Baik :								
		TK %	**60,72**	**61,09**	**61,45**	**61,82**	**93,20**	**61,09**	**61,45**	
		SD (%)	**70,84**	**71,27**	**71,70**	**72,13**	**64,58**	**71,27**	**71,70**	
		SMP (%)	**81,0**	**81,50**	**82,0**	**82,5**	**70,79**	**81,50**	**82,0**	
		3.1.1.1.1.2. Akreditasi Sekolah :								
		TK	**75,00**	**72,59**	**90,00**	**100,00**	**72,59**	**72,59**	**90,00**	
		SD (%)	**98,00**	**97,60**	**98,00**	**100,00**	**97,60**	**97,60**	**98,00**	
		SMP (%)	**88,00**	**89,80**	**90,00**	**100,00**	**89,80**	**89,80**	**90,00**	
4	1.1.1.1.4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan	**4.1.1.1.1.1. Indek Kepuasan Masyarakat :**								
		SD	**80,27**	**80,60**	**80,99**	**81,48**	**81,02**	**80,60**	**80,99**	
		SMP	**77,46**	**77,93**	**78,39**	**78,86**	**80,00**	**77,93**	**78,39**	
		4.1.1.1.1.2. Menajeman Berbasis Sekolah								
		PAUD (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		SD (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
		SMP (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**69,46**	**100**	**100**	

Catatan : * SMA, SMK kewenangan Provinsi

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU)
DINAS PENDIDIKAN
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2021

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.1.	**Meningkatnya kemampuan membaca**	3.865.851.200	932.307.950	3.695.601.094	95.60	
		(IKK/IKU)-Angka Melek Huruf (Non Kumulatif)	96.58 Prosen	99.78	99.78	10331. 33	
		(IKK/IKU)-Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa (Non Kumulatif)	76.46 Prosen	81.21	81.21	10621. 24	
2	1.1.2.	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan**	261.667.699.98 3	10.355.534.150	23.903.468.208	9.14	
		(IKK/IKU)-Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Non Kumulatif)	6.88 Tahun	7.10	7.10	103.20	
3	1.1.3.	**Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan**	106.640.225.95 0	28.758.758.577	109.104.445.723	102.31	
		(IKK/IKU)-Harapan Lama Sekolah (HLS) (Non Kumulatif)	12.67 Tahun	12.27	12.27	9684.2 9	
4	1.1.4.	**Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan**	962.800.762.50 0	127.356.008.552	943.005.285.249	97.94	
		(IKK/IKU)-Manajeman Bebasisa Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	69.46	
		(IKK/IKU)-Indek Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	80.51	102.76	
		(IKK/IKU)-Harapan Lama Sekolah (Non Kumulatif)	12.67 Prosen	12.27	12.27	96.84	
5	1.1.5.	**Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan**	0			0	
		1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid (Non Kumulatif)	0 Dokumen	0.000	6	0	
		Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran) (Non Kumulatif)	0 Prosen	100	100	0	
		Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik) (Non Kumulatif)	0 Prosen	0	0	0	

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021. Realisasi dana pada anggaran yang tersebut diatas tidak 100 % dikarenakan adanya sisa lelang dan efisiensi anggaran karena penyesuaian kebutuhan belanja.

E. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN

Evaluasi dan Analisis Efesiensi dan Efektifitas Kegiatan

Dinas Pendidikan pada tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Infut}}{\text{Realisasi output}} \text{ X } 100\%$$

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome.

Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi outcome}}{\text{Realisasi output}} \text{ X } 100\%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut:

> 100% = Efesien/Efektif

< 100% = Inefesien/Inefektif

= 100% = Sesuai harapan

CAPAIAN PROGRAM (Outcome) TAHUN 2021

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome	Rasio (%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)
1	0.00.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	102.76	
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah (Non Kumulatif)	100 Persen	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini didukung dengan beberapa Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Belanja Non Urusan (Rutin Penyelenggaraan SKPD)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	102.76	
		Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	102.76	
		Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	102.76	
		Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Kumulatif)	78.35 Point	80.51	102.76	
		Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang SD (Non Kumulatif)	80.27 Prosen	81.02	100.93	
		Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Non Kumulatif)	77.46 Prosen	80	103.28	

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome	Rasio (%)	Ket.
2	1.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Program Pengelolaan Pendidikan ini merupakan program pembangunan sektor pendidikan terkait dengan usaha peningkatan mutu pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (Non Kumulatif)	68.41 Prosen	58.49	85.50	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP (Non Kumulatif)	98.80 Prosen	98.50	99.70	
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK (Non Kumulatif)	55 Prosen	73.79	134.16	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (Non Kumulatif)	100.60 Prosen	90.52	89.98	
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP (Non Kumulatif)	70.04 Prosen	88	125.64	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada jenjang TK/PAUD (Kumulatif)	72.90 Prosen	385.22	528.42	
		Standar Pelayanan Minimal (Non Kumulatif)	100 Prosen	90.81	90.81	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (Non Kumulatif)	98.89 Prosen	87.63	88.61	
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA (Non Kumulatif)	80.50 Prosen	88.90	110.43	
		Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	
		Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP) (Non Kumulatif)	72 Prosen	91	126.39	
		Angka partisipasi kasar SD (Non Kumulatif)	100 Prosen	99.53	99.53	
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts (Non Kumulatif)	100 Prosen	113.32	113.32	
		Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Non Kumulatif)	100 Prosen	99.20	99.20	

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome	Rasio (%)	Ket.
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP (Non Kumulatif)	99.98 Prosen	97.54	97.56	
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD (Non Kumulatif)	70.84 Prosen	64.58	91.16	
		Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP (Non Kumulatif)	81 Prosen	64.58	79.73	
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD (Non Kumulatif)	65 Prosen			
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP (Non Kumulatif)	65 Prosen			
		Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara (Non Kumulatif)	96.58 Prosen	99.78	103.31	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD (Non Kumulatif)	97.60 Prosen	97.60	100	
		Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD (Non Kumulatif)	76.46 Prosen	81.21	106.21	
		Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP (Non Kumulatif)	63.30 Prosen	92.87	146.71	
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK (Non Kumulatif)	60.72 Prosen	93.20	153.49	
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD (Non Kumulatif)	85 Prosen	88.50	104.12	
		Angka partisipasi kasar SMP (Non Kumulatif)	100 Prosen	108.06	108.06	

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Outcome	Rasio (%)	Ket.
3	1.01. 03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	124.960.000	124.010.000	99.24	Program Pengembangan Kurikulum ini merupakan program pembangunan sektor pendidikan terkait dengan usaha peningkatan mutu pembelajaran
		Angka partisipasi kasar (Non Kumulatif)	68.41 Prosen	58.46	85.46	
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD (Non Kumulatif)	85 Prosen	88.50	104.12	
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP (Non Kumulatif)	70.04 Prosen	88	125.64	
		Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA (Non Kumulatif)	80.50 Prosen	88.89	110.42	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (Non Kumulatif)	100 Prosen	99.30	99.30	
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD (Non Kumulatif)	65 Prosen	65.66	101.02	
4	1.01. 04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	1.497.350.900	1.449.359.442	96.79	Program Pendidik dan Tenaga Kependikan ini merupakan program pembangunan sektor pendidikan terkait dengan usaha peningkatan mutu SDM dan manajeman pengelolaan pendidikan.
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD (Non Kumulatif)	97.60 Prosen	97.60	100	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP (Non Kumulatif)	98.80 Prosen	98.50	99.70	
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD (Kumulatif)	72.90 Prosen	385.22	528.42	
		Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah (Non Kumulatif)	100 Prosen	69.46	69.46	

REALIASI ANGGARAN (Input) , CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (Output) DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Input/Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	
1	0.00.01.2. 01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.303.100	8.862.300	27.43		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 23.440.800,- hal ini terjadi karena situasi masih PPKM, hanya melaksanakan kegiatan Repat Forum SKPD Musrenbang dengan kapasitas rapat terbatas. Sehingga terdapat efisiensi anggaran.
		Dokumen Renstra 2019 - 2024 dan Dokumen Renja Tahunan (Kumulatif) Non Komulatif	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	Dokumen Renja dan Renstra Perubahan	Capaian Sub Output 3 Dokumen (Renstra Perubahan dan Renja) 100%
2	0.00.01.2. 01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.626.600	34.017.800	51.06		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 32.608.800,- hal ini terjadi karena situasi masih diterapkannya PPKM, sehingga hanya dapat melak-sanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan kapasitas terbatas 50 persen peserta yang diundang. Sehingga terdapat efisiensi anggaran.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (Kumulatif)	4 Dok	4 Dok	100	Dokumen RKA dan DPA Murni dan Perubahan	Capaian Sub Output 4 Dokumen (RKA dan DPA) 100%
4	0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.569.000	187.654.200	80.69		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 44.914.800,- hal ini terjadi karena situasi masih diterapkan PPKM terbatas, hanya bisa melaksanakan 2 pekerjaan kegiatan yang harus dilaksanakan. Sehingga terdapat efisiensi anggaran.
		Dokumen Evaluasi Kinerja (SKM, SPM dan Monev) (Kumulatif)	3 dokumen	3 dokumen	100	Dok IKM, SPM dan LPPD/LKPJ	Capaian Sub Output 3 Dokumen (SPM, IKM dan Evaluasi Kinerja) 100%
5	0.00.01.2. 02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960,623,638,000	918,098,956,096	95.57		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 42.524.681.904,- hal ini terjadi karena penyeuaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (PNS). Sehingga terdapat efisiensi anggaran.
		Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan (Non Kumulatif)	1454 Pegawai	1454 PegawaI	100	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
6	0.00.01.2. 02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	514.636.000	512.352.701	99.56		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.283.300,- hal ini terjadi karena penyeuaian belanja sesuai kebutuhan
		Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah (Kumulatif)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Dokumen Laporan Aset dan Barang milik Daerah	Capaian Sub Output 1 Dokumen (Dokumen laporan Aset dan Barang Milik Daerah) 100%
7	0.00.01.2. 02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	60.483.000	60.483.000	100		Daya serap anggaran 100%
		Dokumen Laporan Daya serap keuangan (Kumulatif)	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	Dokumen Laporan Keuangan	Capaian Sub Output 3 Dokumen (Laporan Semester, Tahunan dan Laporan CALK Tahun 2021) 100%
8	0.00.01.2. 03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.482.000	155.482.000	100		Daya serap anggaran 100%
		Penataan Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB yang disewa dari masyarakat / pemerintahan desa (Non Kumulatif)	15 Lokal	15 Lokal	100	12 SMPN, 1 TKN Lemah-abang, 1 SLBN Depok, 1 UPT SKB Kab. Cirebon	Capaian Sub Output 15 Lokal (100%) (Pembayaran Sewa tanah lahan sekolah 12 SMPN, 1 TKN Lemah-abang, 1 SLBN Depok, 1 UPT SKB Kab. Cirebon)
9	0.00.01.2. 06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.446.100	74.446.100	100		Daya serap anggaran 100%

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik (Kumulatif)	126 Unit	126 Unit	100.00		Capaian Sub Output 126 Unit (100%) (Barang kebutuhan Instalasi kelistrikan)
10	0.00.01.2. 06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	270.908.800	269.586.750	99.51		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.322.050,- hal ini terjadi karena adanya kesalahan entri dalam penetapan anggaran belanja
		Barang cetakan dan penggandaan (Kumulatif)	1045 Paket	1044 Paket	183.25		Capaian Sub Output 1044 Paket barang cetak (100%)
11	0.00.01.2. 06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.020.000	190.020.000	100		Daya serap anggaran 100%
		Behan bacaan Media masa (Kumulatif)	12700 Eksemplar	12700 Eksemplar	100.00	Media Cetak (Koran)	Capaian Sub Output Sub Kegiatan 12700 Eksemplar Meida Cetak (Pengadaan bahan bacaan Koran untuk 42 Unit Kerja)
12	0.00.01.2. 06.07.	Penyediaan Bahan/Material	509.611.400	500.233.400	98.16		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.378.000,- hal ini merupakan sisa belanja Benda POS yang tidak terserap karena Perangko Rp. 6.000 dan 3.000, sudah tidak diproduksi

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Alat Tulis Kantor (Kumulatif)	1075 Paket	1011 Paket	94.05	Penyediaan ATK untuk 42 unit Kerja	Capaian Sub Output Sub Kegiatan 1011 Paket barang ATK untuk 42 unit Kerja (94.05%)(Penyediaan ATK untuk 42 unit Kerja untuk 42 Unit Kerja)
13	0.00.01.2. 06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	305.750.000	255.750.000	83.65		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 50.000.000,- hal ini karena belanja Mamin untuk penyelenggaran Hardiknas tidak dilaksanakan sehubungan masih Pandemi Covid 19
		Makanan dan Minuman untuk rapat- rapat kedinasan (Non Kumulatif)	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan penyediaan belanja untuk Makanan dan Minuman untuk rapat- rapat kedinasan(untuk 42 Unit Kerja) 100%
14	0.00.01.2. 06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.007.000	61.995.000	70.44		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 26.012.000,- dan capaian out put hanya 9 Bulan (75%), hal ini karena :
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kumulatif)	12 Bulan	9 Bulan	100		1. Sisa pembayaran Perjalanan Dinas Biasa tidak terserap senilai Rp. 375.000

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
							2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota tidak terserap senilai Rp. 25.637.000,- karena sehubungan pada triwulan II masih pandemi Covid 19
15	0.00.01.2. 07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.760.000	183.867.500	91.13		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.892.500,- hal ini merupakan sisa hasil penawaran dari penyedia barang pada pengadaan 60 Kursi Kerja, 9 Komputer, 9 Printer dan 10 UPS, 1 Role Opec
		Perlengkapan Gedung Kantor (Kumulatif)	8 Paket Unit	8 Paket Unit	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 8 paket Unit barang (100%)
16	0.00.01.2. 08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	465.097.642	361.107.868	77.64		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp103.989.774,- hal ini merupakan sisa pembayaran sesuai kebutuhan.
		Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air untuk Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bidang Pendidikan Kecamatan dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (Non Kumulatif)	42 Unit	42 Unit	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan Pemenuhan kebutuhan belanja untuk pembayaran Listrik, Telephon dan Air dalam 1 tahun pada 42 Unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan 100%.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
17	0.00.01.2. 08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.881.600	74.881.600	100		Penyelenggaraan Bimtek pengelolaan Arsip bagi petugas penataan arsip pada Sekolah.
		Dokumen Teknis Pengadministrasian dan Tata Kelola Kearsipan (Kumulatif)	1 Dokumen	1	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 1 Dokumen Bimtek Penataan Kearsipan (100%)
18	0.00.01.2. 09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.786.600	1.000.786.600	100		Serapan anggaran 100% sesuai kebutuhan
		Bahan Bakar Kendaraan Dinas (Kumulatif)	278 Unit	278 Unit	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 278 Unit Kendaraan Dinas (Penyedian Bahan bakar dan Olie untuk Kendaraan Dinas) 100%
19	0.00.01.2. 09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.900.000	65.900.000	100		Serapan anggaran 100% sesuai kebutuhan
		STNK Kendaraan Dinas (Kumulatif)	278 Unit	278 Unit	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 278 Unit Kendaraan Dinas (Penyediaan biaya Pajak untuk Kendaraan Dinas) 100%
20	0.00.01.2. 09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.990.000	203.990.000	100		Serapan anggaran 100% sesuai kebutuhan

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Peratalatan Gedung Kantor (Non Kumulatif)	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (Penyediaan biaya untuk Jasa Servis)Peralatan Kantor yang terdiri dari AC, Komputer, Printer dan Jaringan pada 42 unit kerja (100%)
21	0.00.01.2. 09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.904.489.900	1.853.103.475	97.30		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51.386.425,- hal ini merupakan sisa penawaran pelaksanaan Rehab Gedung Kantor.
		Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bid. Pendidikan Kecamatan dan Kantor SKB (Non Kumulatif)	42 Unit Kerja	42 Unit Kerja	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (Pemeliharaan Gedung Kantor 42 Unit kerja, Rehab 2 Unit Gedung Kantor Koorwil Kec. Gegesik dan Pasaleman) 100%
22	1.01.02.2. 01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	204.830.700	204.120.700	99.65		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 710.000,- hal ini merupakan sisa penawaran.
		Gedung Sekolah Baru (Kumulatif)	1 Unit	1 Unit/Lokal	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (dibangunnya 1 Lokal Ruang Guru pada SD) 100%
23	1.01.02.2. 01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.157.232.000	2.147.602.193	99.55		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.629.807,- hal ini merupakan sisa penawaran.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (Kumulatif)	100 Lokal	9 Lokal	9.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya terpenuhi 9 Lokal RKB karena menyesuaikan dengan Anggaran yang diterima (9%)
25	1.01.02.2. 01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4.643.717.800	4.626.035.800	99.62		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.862.000,- hal ini merupakan sisa penawaran dari belanja fisik dan jasa konsultan.
		Ruang Pepustakaan Sekolah (Kumulatif)	53 Lokal	24 Lokal	45.28		Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya terpenuhi 24 Lokal (Ruang) Perpustakaan karena menyesuaikan dengan Anggaran yang diterima (DAK) (42,28%)
26	1.01.02.2. 01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.217.523.100	8.170.716.429	99.43		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 46.806.671,- hal ini merupakan sisa penawaran dari belanja fisik dan jasa konsultan.
		Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih (Kumulatif)	76 Lokasi	37 Lokasi	48.68		Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya terpenuhi 37 Lokasi pemagaran (48,68%) dan 112 Pintu (28 Sekolah) Pembangunan Jamban Sekolah (41,17%) karena menyesuaikan dengan Anggaran yang diterima.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah (Kumulatif)	68 Sekolah	28 Sekolah	41.17		
27	1.01.02.2. 01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	23.695.727.400	22.662.987.341	95.64		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.032.740.059,- hal ini merupakan sisa penawaran dari belanja fisik dan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan
		Ruang Kelas Sekolah SD (Kumulatif)	450 Lokal	270 Lokal	60.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya terpenuhi 270 Lokal (Rehab Ruang) Kelas (60%) karena menyesuaikan dengan Anggaran yang diterima.
29	1.01.02.2. 01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.835.344.300	1.825.894.300	99.49		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.450.000,- hal ini merupakan sisa penawaran dari belanja fisik dan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan
		Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa (Kumulatif)	50 Lokal	13 Lokal	26.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya terpenuhi 13 Lokal (Rehab Ruang) Perpustakaan (26%) karena menyesuaikan dengan Anggaran yang diterima.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
30	1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	10.866.440.400	10.852.648.230	99.87		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.792.170- hal ini merupakan sisa penawaran, dan Capaian Sub Output Sub Kegiatan hanya sebanyak 166 Lokal (94.86%) pengadaan meubelair sekolah.
		Meubelair Sekolah SD (Kumulatif)	175 Lokal	166 Lokal	94.86		
32	1.01.02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	566.726.400	546.814.170	96.49		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.912.230- hal ini merupakan sisa penawaran pengadaan buku Raport Siswa, Sampul sesuai dengan jumlah siswa baru pada SD. Dan capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 36.230 Eksemplar buku rapat dan sampulnya (100%)
		Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa (Kumulatif)	1 Paket	36.230 Eksemplar	100		
34	1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.814.449.000	2.812.997.002	99.95		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp101.451.998 hal ini merupakan sisa belanja sesuai dengan kebutuhan.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		PTK Non PNS mendapatkan tunjangan (Non Kumulatif)	64800 Orang	64800 orang	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (Pemberian honorarium untuk 64.800 orang tenaga pengawasan dalam pelaksanaan ujian pada SD. 100%)
35	1.01.02.2. 01.22.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.115.699.600	1.083.995.100	97.16		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 31.704.500,- hal ini merupakan sisa penawaran.
		Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan (Kumulatif)	115 Paket	25 Paket	21.74		Capaian Sub Output Sub Kegiatan Pengadaan Alat TIK untuk penunjang KBM SD sebanyak 25 Paket (21,74%)
36	1.01.02.2. 01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	93.834.000	92,822,000	98.92		Daya serap anggaran sebesar 98,92%, karena masih ada sisa dana sebesar Rp 1.012.000,- dan ini merupakan siswa belaja karena penyesuaian harga
		Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar (Kumulatif)	928 Sekolah	928 Sekolah	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan pelaksanan monev terhadap sejumlah 928 Sekolah SD (100%)
		Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar (Kumulatif)	561 orang	561 orang	100		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (pelaksanan sosialisasi terhadap sejumlah 561 orang 100%

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
37	1.01.02.2. 01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	460.070.300	293.298.300	63.75		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 166.772.000,- , hal ini karena pelaksanaan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan berbagia lomba ke tingkat Provinsi dan Nasional, namun karena kondisi masih PPKM sehingga tidak semua kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
		Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri (Non Kumulatif)	55 Cabang Lomba	16 Cabang Lomba	29.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan (penyelenggaran lomba hanya dilombakansebanyak 16 Cabor (29 00%)
		Jumlah siswa SD yang dapat membaca dan menulis (Non Kumulatif)	196039 Siswa	197340 Siswa	100.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan untuk siswa yang sudah dapat baca dan tulus huruf Al Qur'an sebanyak 197340 Siswa, dan Setifikat Baca Tulis Alqur'an diberikan oleh Kemenag.
		Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an (Kumulatif)	50000 Eksemplar	141745 Eksemplar	100.00		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
38	1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.158.130.200	1.151.284.207	99.41		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.845.993,- , sisa dana alokasi yang disalurkan untuk pemberian honorarium Gurdacil, dengan capaian Sub Output Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan sebanyak 96 orang (200%), Jumlah Guru SD Berprestasi sebanyak 9 orang (100%) dan jumlah Guru Penggerak pada SD sebanyak 168 orang (165%)
		Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi (Kumulatif)	9 Orang	9 Orang	100		
		Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan (Kumulatif)	48 orang	96 orang	200.00		
		Jumlah Guru Penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD) (Kumulatif)	20 orang	168 orang	165		
40	1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	172.998.413.233	172.931.470.110	99.96		Sebanyak 930 SD menerima dana BOS
		Sekolah Dasar (SD) mendapat dana BOS (Non Kumulatif)	920 Sekolah	930 Sekolah	100		
		PTK Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri mendapatkan Honorarium (Non Kumulatif)	4448 orang	0	0		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
41	1.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	207.874.700	207.280.700	99.71		Serapan anggaran 99,71% dan Sisa sebesar Rp 594.000,- merupakan Lelang / penawaran.
		Ruang Kelas Baru SMP (Kumulatif)	80 Lokal	2 Lokal	2.50		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 2 Lokal RKB (2,5%) hal ini karena Menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan
42	1.01.02.2.02.10.	Pembangunan Fasilitas Parkir	707.220.400	705.829.400	99.80		Serapan anggaran 99,80% dan Sisa sebesar Rp 1.391.000,- Adanya Sisa Lelang / penawaran
		Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah (Kumulatif)	10 Lokal	5 Lokal Sekolah	50.00		Capaian Sub Output Sub Kegiatan 5 Lokasi yang dibangun pagar (50%) hal ini karena Menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan
43	1.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	162.144.600	161.416.600	99.55		Serapan anggaran 99,55% dan Sisa sebesar Rp 728.000,- Adanya Sisa Lelang / penawaran
		Jamban Siswa dan Sarana Air bersih (Kumulatif)	400 unit	6 Unit/Pintu	1.50		Capaian hanya 6 unit (24 Pintu) 1.50% karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
44	1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.185.012.700	14.335.219.834	94.40		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp 8849.792.866,- merupakan sisa Penawaran Lelang Jasa konsultan dan Konstruksi (DAK), dan Capaian Sub Output sebanyak 101 Lokal Rehab RK (63.13%) karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima (DAK dan APBD Kabupaten)
		Ruang Kelas Sekolah SMP (Kumulatif)	160 Lokal	101 Lokal	63.13		
45	1.01.02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.136.804.000	1.064.732.703	93.66		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp 72.071.297,- merupakan sisa Penawaran Lelang konstruksi dengan serapan anggaran 93,66%. Capaian Sub Output sebanyak 4 Ruang Guru yang direhab (16%) hal ini karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima
		Ruang Kerja Guru (Kumulatif)	25 Ruang	4 Ruang	16.00		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
46	1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	284.201.000	258.076.932	90.81		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp 26.124.068,- merupakan sisa Penawaran Lelang konstruksi. Capaian Sub Output sebanyak 1 Unit Ruang Perpustakaan yang direhab (33,33%) karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima
		Ruang Perpustakaan Sekolah (Kumulatif)	3 Unit	1 Unit	33.33		
47	1.01.02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.385.268.000	2.267.145.199	95.05		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp118.122.801,- merupakan sisa Penawaran Lelang konstruksi. Capaian Sub Output sebanyak 8 Lokal Rehab Ruang Lab Sekolah (40%) karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima
		Ruang Laboratorium Sekolah (Kumulatif)	20 lokal	8 Lokal	40.00		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
48	1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	826.690.000	789.860.878	95.54		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp36.829.122,- merupakan sisa Penawaran Lelang konstruksi. Capaian Sub Output sebanyak 36 Unit Rehab Jamban Siswa (66.66%) karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima
		Ruang WC Siswa dan Guru (Kumulatif)	54 Unit	36 Unit	66.66		
49	1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	99.543.900	97.810.900	98.26		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp1.733.000,- merupakan sisa Penawaran dari penyedia. Capaian Sub Output sebanyak 4 Lokal Meubelair Sekolah (16,66%) karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima
		Meubaliar Sekolah SMP (Kumulatif)	24 Lokal	4 Lokal	16.66		
50	1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.000.000.000	2.995.725.300	99.86		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp4.274.700,- merupakan sisa Penawaran dari penyedia.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah (Kumulatif)	160 Unit	13 Unit	8.12		Capaian Sub Output sebanyak 13 Unit (63.13%) Perlengkapan Pembejaran TIK, karena menyesuaikan dengan anggaran yang diterima untuk Pengadaan Peralatan Komputer dari Bantuan Provinsi
51	1.01.02.2. 02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	681.643.150	586,025,216	85.25		Terdapat Sisa anggaran sebesar Rp 95.617.934,- merupakan sisa Penawaran dari penyedia dan serapan anggaran sebesar 85,25%
		Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa (Kumulatif)	1 Paket	1 Paket	100		Capaian Sub Output sebanyak 1 paket (100%) , karena menyesuaikan dengankebutuhan dalam Pengadaan Buku Rapot dan sampulnya untuk siswa baru SMP
52	1.01.02.2. 02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.539.768.000	1,534,831,504	99.68		Realisasi anggaran sebesar 99,68%, karena,adanya sisa Premi BPJS yang diserap sesuai dengan premi setiap bulanya.
		PTK Non PNS mendapatkan tunjangan (Non Kumulatif)	100 Orang	1234 Orang Guru	100		Capaian Sub Output sebanyak PTK Non PNS mendapatkan tunjangan (1234 orang) 100%

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
54	1.01.02.2.02.36.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	260.717.600	259.693.616	99.61		Realisasi anggaran sebesar 99,61%, karena, adanya sisa penawaran sebesar Rp 1.023.984,-
		Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line (Kumulatif)	1 dokumen	1 Dokumen	100		Capaian Sub Output sebanyak 1 Dokumen (Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line) 100%
56	1.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.484.000	29.472.008	99.96		Karena terdampak Rekofusing sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, dan anggaran yang tersisa hanya untuk honorarium tenaga honor pada bida SMP, seingga capaian output 0%.
		Guru Berprestasi (Kumulatif)	209 orang	0	0		
		Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof (Kumulatif)	160 orang	0	0		
		Peseta mendapatkan sertifikat (Kumulatif)	300 orang	0	0		
		Jumlah Guru Penggerak pada jenjang SMP (Kumulatif)	250 Guru	0	0		
	1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	63.589.275.350	63.582.315.367	99.98		Capaian Sub Output sebanyak 210 SMP menerima dana BOS (100%)

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
57	1.01.02.2. 03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	132.010.000	131.115.000	99.32		Realisasi anggaran 99,32%, terdapat Sisa anggaran sebesar Rp 895.000,- sebagai siswa Honorarium Panitia Pengadaan rehabilitasi Tiolet
		Jumlah Bangunan Gedung TK/PAUD yang direhab perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah (Kumulatif)	3 Lokasi	9 Lokasi	100		Capaian Sub Output sub Kegiatan membangun 9 Lokal (100%) (Rehabilitasi jamban siswa beserta sanitasi) pada TK Negeri
58	1.01.02.2. 03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3.374.631.400	2.962.906.274	87.80		Realisasi anggaran sebesar 87.80%, hal ini karena terdapat Sisa lelang fisik dan sosialisasi DAK tidak di laksanakan karena waktu tidak memungkinkan sebesar Rp 411.725.126,-
		Terlaksananya Rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Sekolah (Kumulatif)	3 lokal	11 ruang guru dan 23 ruang kelas	100		Capaian Sub Output sub Kegiatan Pekerjaan Rehab 11 ruang guru dan 23 ruang kelas (100%)
59	1.01.02.2. 03.07.	Pengadaan Mebeluer PAUD	10.000.000.000	9.931.167.140	99.31		Realisasi anggaran sebesar 99,31%, Terdapat Sisa penawaran dari penyedia dan sosialisasi tidak dilaksana kan karena anggaran masuk di bulan Oktober sebesar Rp 68.832.860,-

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Meubelair Sekolah (Kumulatif)	10 Lokal	257 Lokal	100		Capaian Sub Output sub Kegiatan 257 lokal (100%) pengadaan meubelair, Bantuan keuangan dari Provinsi
60	1.01.02.2. 03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	204.950.000	202.615.750	98.86		Relisasi anggaran sebesar 98.86%, terdapat Sisa Penawaran dan honora rium PjPHP sebesar Rp 2.334.250,-
		Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar) (Kumulatif)	10 Paket	11 Paket	100		Capaian Sub Output sub Kegiatan Pekngadaan Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar) 11 Paket (100%)
61	1.01.02.2. 03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	474.999.600	463.766.600	97.64		Realisasi anggaran sebesar 97,64%, terdapat Sisa Penawaran dan honora rium PjPHP sebesar Rp 11.233.000,-
		Buku Referensi dan Raport (Kumulatif)	23000 Paket / Exemplar	32.650 Paket/Exemplar	100.00		Capairan Sub Output sub kegiatan Pengadaan Buku Rapot dan sampulnya untuk siswa baru PAUD sebanyak 32.650 Eksemplar (100%).
62	1.01.02.2. 03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	89.723.400	0	0		Karena kondisi covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan.
		Lembaga Penyelenggara PAUD (Kumulatif)	750 Lembaga	0	0		
		Lembaga PAUD (Kumulatif)	750 Lembaga	0	0		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
63	1.01.02.2. 03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	77.015.200	77.015.200	100.00		Serapan angaran 100%
		Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD (Kumulatif)	1 Dokumen	3 Dokumen	100.00		Capairan Sub Output sub kegiatan 3 dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD (100%).
64	1.01.02.2. 03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	247.499.800	246.799.800	99.72		Sisa Belanja Mamin sesuai kebutuhan. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Guru, Kepala dan Pengawas TK Berprestasi
		Jumlah Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi, dan Peserta Lokakarya (Kumulatif)	1 Orang	12 Orang	100		Capaian Sub Output sebanyak 12 orang Guru , Kepala dan Pengawas TK berprestasi (100%)
		Jumlah Guru Penggerak pada Jenjang TK (Kumulatif)	10 orang	12 Orang	100		
65	1.01.02.2. 03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	563.475.600	560.239.615	99.43		Sisa Belanja PPHP dan Premi BPJS
		Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD (Kumulatif)	750 Orang	800 Orang	106.67		Sosialisasi pengelolaan dana BOP
		Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi (Kumulatif)	380 Dokumen	150 Orang	39.47		Sosialisasi pengelolaan dana BOP

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Jumlah Lembaga PAUD dan Gugus PAUD Berprestasi (Kumulatif)	300 Lembaga	18 Lembaga dan 80 Orang Guru	30.67		Sosialisasi pengelolaan pelaksanaan Akreditasi Lembaga PAUD/TK
		Dokumen model bahan ajar (Kumulatif)	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
66	1.01.02.2. 03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.407.400.000	20.336.400.000	95		Realisasi anggaran 95%, Penyesuaian dengan jumlah peserta didik pada DAPODIK
		Jumlah lembaga TK/PAUD Penerima dana BOP (Non Kumulatif)	680 Lembaga	769 Lembaga	0		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 769 Lembaga menerima dan BOP (100%).
68	1.01.02.2. 04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.405.780.900	3.402.302.794	99.90		Realisasi anggaran 99.90%, sisa danasebesar Rp 3.478.106 merupakan sisa premi BPJS yang tidak diserap
		Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA (Kumulatif)	3500 orang	2432 orang	69.48		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 2432 orang lulus kesetaraan Paket C (69.49%).
		Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP (Non Kumulatif)	1284 Orang	1241 orang	96.65		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 1241 orang lulus kesetaraan Paket B (96,65%).
		Warga Belajar Paket A setara SD (Kumulatif)	254 Warga Belajar	348 orang	100.00		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 348 orang lulus kesetaraan Paket A (100%).

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Jumlah Warga Belajar yang telah mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2019 dan warga belajar yang buta aksara. Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi (Kumulatif)	2000 Warga Belajar	260 orang	13		
69	1.01.02.2. 04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	308.650.000	308.650.000	100		Realisasi Anggaran 100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C (Kumulatif)	100 orang	100	100		Capaian Sub Output Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C hadir 100 orang (100%), Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan hadir 100 orang (100%) dan Peserta pelatihan kompetensi tutor paket b hadir 120 orang (100%)
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (Kumulatif)	100 orang	100	100		
		Jumlah Peserta pelaksanaan pelatihan kompetensi tutor paket b (Kumulatif)	120 orang	120	100		

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
71	1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.286.100.000	11.286.100.000	100.00		Serapan anggaran 100%
		Lembaga Penerima BOP Kesestaraan	75 Lembaga	61 Lembaga	81.33		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 61 Lembaga menerima dan BOP (81.33%).
73	1.01.03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	124.960.000	124.010.000	99.24		Serapan anggaran 99.24%, Sisa anggaran Rp 950.000,- merupakan Honorarium Panitia Pengadaan yang tidak diserap.
		Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD (Non Kumulatif)	500 Eksemplar	160 Eksemplar	32		Capaian Sub Output sub kegiatan sebanyak 160 Eksemplar Sertifikat diberikan kepada Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD (32%).
74	1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.294.993.600	1.254.952.142	96.91		Serapan anggaran sebesar 96,91%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 40.041.458,- merupakan sisa belanja karena situasi masih PPKM, hanya bisa melaksanakan 2 pekerjaan kegiatan yang harus dilaksanakan.

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
		Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen (Kumulatif)	350 orang	520 orang	0		Capaian Sub Output : Peserta Bimtek Dapodik hadir 520 orang (100%), Peserta Bimtek Verval PTK dan Verval PD hadir 350 orang (100%) dan Penyusunan Dokumen Profil Pendidikan sebanyak 2 Dokumen (100%) beserta pembuatan Aplikasinya.
		Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD (Kumulatif)	350 orang	350 orang	0		
		Dokumen Profil Pendidikan (Kumulatif)	2 dokumen	2 Dokumen	0		
		Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan (Kumulatif)	1 dokumen	1 Aplikasi	0		
		Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kumulatif)	4 Dok	4 Dokumen	0		Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas/Penilik telah dilaksanakan dengan hasil 1 Dokumen Penilaian Kinerja (100%)
75	1.01.04.2. 01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	202.357.300	194.407.300	96.07		Serapan angaran kegiatan sebesar 96.07%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.950.000,- yang

No	Kode	Nama Sub Kegiatan / Indikator Output	Anggaran / Target Kinerja Satuan	Realisasi Anggaran / Output	Rasio (%)	Keterangan	
							merupakan sisa belanja kegiatan karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
		Jumlah Peseta Bimbingan Teknis memahami dan menguasi materi pelatihan yang telah diberikan dan bisa mengimplementasikan pada tugas yang diampunya (Kumulatif)	2760 Orang	500 orang	18.12		Capaian Sub Output dari sub kegiatan Jumlah Peserta Bimtek Angka Kredit yang diundang 500 orang peserta karena menyesuaikan dengan dana yang dipagukan dan yang hadir 500 orang (100)

Dari Table Diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan efesiensi dan efektifitas kegiatan didapat bahwa tingkat efesiensi dan efektifitas dari 68 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yaitu:

a. Efektif dan Efisien. Yaitu realisasi input < 100% namun realisai output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 28 Sub Kegiatan masuk dalam katagori efektif dan efisien (80,00 %). Kegiatan tersebut tersebar pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 3 Sub Kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan. Program Pengelolaan Pendidikan 1 kegiatan, 6 sub kegiatan. 1 kegiatan, 3 sub kegiatan. 1 kegiatan, 7 sub kegiatan. 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.

b. Efisien. Yaitu realisasi input, output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 10 sub kegiatan masuk dalam katagori efisien (20 %). Sub kegiatan tersebut meliputi 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 2 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 3 sub kegiatan. Program pengelolaan pendidikan 1 kegiatan 1 sub kegiatan. 1 kegiatan 1 sub kegiatan.

c. In Efisien. Yaitu realisasi input lebih besar daripada realisasi output dan outcome.

   Sebanyak 30 kegiatan termasuk katagori in efisien (30 %) yaitu tersebar di beberapa program kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2021 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut : 89,85% Mencapai target/meningkat dan 10,40% tidak mencapai target.

Pada dasarnya tugas-tugas yang diemban oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan pendidikan.

Fungsi utama yang harus dilaksanakan lembaga ini adalah sebagai penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang pendidikan telah berjalan dengan semestinya dan tidak mendapat hambatan yang berarti (berjalan lancar). Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa realisasi keuangan mencapai 99,97% dan realisasi fisik mencapai 98,68%. Dengan adanya kegiatan tersebut terdapat peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sehingga memperlancar proses belajar mengajar diseluruh jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada. Namun hal tersebut dapat dijadikan bahan introspeksi diri guna perbaikan terhadap sesuatu yang dirasa masih kurang dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik yang telah dicapai oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon.

---------- *** ----------

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

Lamp: II/5-5

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
1	Meningkatnya Kemampuan Membaca	**ANGKA MELEK HURUF**	Jumlah Penduduk ≥ 15 th dapat membaca/jml penduduk ≥ 15 th.	%	96.58	99.73	103.26
		MELEK HURUF AL-QUR'AN					
		SD	Jumlah siswa SD dapat membaca Al-Qur'an/Jumlah siswa SD	%	76.46	76.46	100.00
		SMP	Jumlah siswa SMP dapat membaca Al-Qur'an/Jumlah siswa SMP	%	63.30	63.30	100.00
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	Jumlah tahun ijazah penduduk ≥ 25 th/Jumlah penduduk ≥ 25 th.	%	6.88	7.10	103.20
		APK					
		APK PAUD	Jumlah siswa	%	68.41	58.49	85.50
			TK/PAUD dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 4-6 thn) x 100%				
		APK SD/MI	Jumlah siswa	%	100.00	99.53	99.53
			SD/MI/Paket A dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100%				
		APK SMP/MTs	Jumlah siswa	%	100.00	108.06	108.06
			SMP/MTs/Paket B dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%				
		APM					
		APM SD/MI	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang	%	100.00	90.53	90.53
			SD/MI/Paket A dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100%				
		APM SMP/MTs	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang	%	98.89	87.83	88.82
			SMP/MTS dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%				
		RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)					
		TK	Jumlah siswa TK dibagi jumlah	%	01:22	1:20	110.00
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		SD	Jumlah siswa SD dibagi jumlah	S/K	01:24	01:27	96.55
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah	S/K	01:32	01:31	101.10
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL					
		PKBM	Jumlah Lembaga Yang Ada		80	75	93.75
		LKP	Jumlah Lembaga Yang Ada		70	91	130.00
3	Meningkatnya Mutu Dan Relefansi Pendidikan	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	Tahun Lama Sekolah	%	12.67	12.27	96.84
		ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)					

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
		SD	Jumlah siswa putus sekolah	%	0.01	0.04	400.00
			SD dibagi dengan Jumlah siswa pada				
			jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah siswa putus sekolah	%	0.19	0.12	63.16
			SMP dibagi dengan Jumlah siswa pada				
			jenjang yang sama x 100%				
		ANGKA LULUSAN (AL)					
		SD	Jumlah lulusan pada jenjang SD dibagi	%	100.00	99.30	99.30
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		SMP	Jumlah lulusan pada jenjang SMP dibagi	%	99.98	97.58	97.60
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket A Setara SD	Jumlah lulusan pada jenjang Paket A Setara SD dibagi	%	85.00	88.50	104.12
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket B Setara SMP	Jumlah lulusan pada jenjang Paket B Setara SMP dibagi	%	70.04	88.00	125.64
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket C Setara SMA	Jumlah lulusan pada jenjang Paket C Setara SMA dibagi	%	80.50	88.89	110.42
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Lembaga Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga Yang Ada	%	100.00	100.00	100.00
		ANGKA MELANJUTKAN					
		SD ke SMP	Jumlah Siswa Baru SMP Sederajat/Jumlah Lulusan SD Sederajat	%	100.00	113.32	113.32
		GURU LAYAK MENGAJAR					
		TK	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi dengan Jumlah Guru TK seluruhnya pada jenjang yang sama x 100%	%	72.90	76.84	105.40
		SD	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	%	97.60	97.60	100.00
			dibagi dengan Jumlah Guru SD seluruhnya				
			pada jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	%	98.80	98.5	99.70
			dibagi dengan Jumlah Guru SMP seluruhnya				
			pada jenjang yang sama x 100%				
		RASIO GURU PER SISWA					
		TK	Jumlah Siswa TK/Jumlah guru TK	%	15.00	01:11	73.33
		SD	Jumlah Siswa SD/Jumlah guru SD	%	20.00	01:21	105.00
		SMP	Jumlah siswa SMP /Jumlah guru SMP	%	20.00	01:16	80.00
		KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK					

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
		TK	Jumlah ruang kelas TK kondisi baik dibagi	%	60.72	93.20	153.49
			jumlah ruang kelas TK				
		SD	Jumlah ruang kelas baik jenjang SD dibagi	%	70.84	64.58	91.16
			jumlah ruang kelas pada jenjang yang sama				
			x 100%				
		SMP	Jumlah ruang kelas baik jenjang SMP dibagi	%	81.00	70.79	87.40
			jumlah ruang kelas pada jenjang yang sama				
			x 100%				
		TERAKREDITASI					
		TK	Jumlah TK terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh TK	%	75.00	72.59	96.79
		SD	Jumlah SD terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh SD	%	98.00	97.60	99.59
		SMP	Jumlah SMP terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh SMP	%	88.00	89.80	102.05
4	Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pendidikan	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**					
		SD	Nilai IKM SD / Jumlah SD	%	80.27	81.02	100.93
		SMP	Nilai IKM SMP / Jumlah SMP	%	77.46	80.00	103.28
		MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH					
		PAUD	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100.00	100.00	100.00
			jenjang PAUD dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				
		SD	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100.00	100.00	100.00
			jenjang SD dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100.00	69.46	69.46
			jenjang SMP dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN REALISASI TAHUN LALU

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	99.73	99.73
	MELEK HURUF AL-QUR'AN			
	SD	%	72.86	76.46
	SMP	%	86.46	63.30
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	6.92	7.10
	APK			
	APK PAUD	%	42.03	58.49
	APK SD/MI	%	116.22	99.53
	APK SMP/MTs	%	157.08	108.06
	APM			
	APM SD/MI	%	103.75	90.53
	APM SMP/MTs	%	126.36	87.83
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)			
	TK	%	22.00	20.00
	SD	S/K	27.00	27.00
	SMP	S/K	22.00	31.00
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL			
	PKBM		64	75
	LKP		70	91
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12.25	12.27
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)			
	SD	%	0.00	0.01
	SMP	%	0.14	0.12
	ANGKA LULUSAN (AL)			
	SD	%	98.96	99.30
	SMP	%	95.53	97.58
	Paket A Setara SD	%	95.00	88.50
	Paket B Setara SMP	%	95.00	88.00
	Paket C Setara SMA	%	92.90	88.89
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100.00	100.00
	ANGKA MELANJUTKAN			
	SD ke SMP	%	82.99	113.32
	GURU LAYAK MENGAJAR			
	TK	%	77.18	76.84
	SD	%	97.06	97.60
	SMP	%	97.63	98.50
	RASIO GURU PER SISWA			
	TK	%	10.00	11.00
	SD	%	21.00	21.00
	SMP	%	15.00	16.00
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK			
	TK	%	90.22	93.20
	SD	%	59.27	64.58
	SMP	%	75.54	70.79

	TERAKREDITASI			
	TK	%	88.17	72.59
	SD	%	97.60	97.60
	SMP	%	82.50	89.80
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**			
	SD	%	80.97	81.02
	SMP	%	79.95	80.00
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH			
	PAUD	%	100	100.00
	SD	%	100	100.00
	SMP	%	69.46	69.46

55.57

70

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Akumulasi s/d 2021	Keterangan
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	99.73	99.73	
	MELEK HURUF AL-QUR'AN				
	SD	%	76.46	76.46	
	SMP	%	63.30	63.30	
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	7.10	7.10	Update BPS Jabar per Desember 2021
	APK				
	APK PAUD	%	58.49	58.49	
	APK SD/MI	%	99.53	99.53	
	APK SMP/MTs	%	108.06	108.06	
	APM				
	APM SD/MI	%	90.53	90.53	
	APM SMP/MTs	%	87.83	87.83	
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)				
	TK	%	20.00	20.00	
	SD	S/K	27.00	27.00	
	SMP	S/K	31.00	31.00	
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL				
	PKBM		75	75	
	LKP		91	91	
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12.27	12.27	Update BPS Jabar per Desember 2021
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)				
	SD	%	0.04	0.04	
	SMP	%	0.12	0.12	
	ANGKA LULUSAN (AL)				
	SD	%	99.30	99.30	
	SMP	%	97.58	97.58	
	Paket A Setara SD	%	88.50	88.50	
	Paket B Setara SMP	%	88.00	88.00	
	Paket C Setara SMA	%	88.89	88.89	
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100.00	100.00	
	ANGKA MELANJUTKAN				
	SD ke SMP	%	113.32	113.32	
	GURU LAYAK MENGAJAR				
	TK	%	76.84	76.84	
	SD	%	97.60	97.60	
	SMP	%	98.50	98.50	
	RASIO GURU PER SISWA				
	TK	%	11.00	11.00	
	SD	%	21.00	21.00	
	SMP	%	16.00	16.00	
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK				
	TK	%	93.20	93.20	
	SD	%	64.58	64.58	
	SMP	%	70.79	70.79	
	TERAKREDITASI				
	TK	%	72.59	72.59	
	SD	%	97.60	97.60	

No.	Indikator	Satuan	Realisasi	Realisasi	Keterangan
	SMP	%	89.80	89.80	
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				
	SD	%	81.02	81.02	
	SMP	%	80.00	80.00	
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH				
	PAUD	%	100.00	100.00	
	SD	%	100.00	100.00	
	SMP	%	69.46	69.46	

REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2021) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Akumulasi	Rencana Sesuai Renstra	Keterangan
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	99.73	96	
	MELEK HURUF AL-QUR'AN				
	SD	%	76.46	76.00	
	SMP	%	63.30	59.55	
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	7.10	6.92	Update BPS Jabar per Desember 2021
	APK				
	APK PAUD	%	58.49	66.80	
	APK SD/MI	%	99.53	115.00	
	APK SMP/MTs	%	108.06	113.00	
	APM				
	APM SD/MI	%	90.53	100.00	
	APM SMP/MTs	%	87.83	126.36	
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)				
	TK	S/K	20.00	20	
	SD	S/K	27.00	24.00	
	SMP	S/K	31.00	32.00	
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL				
	PKBM		75	80	
	LKP		91	70	
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12.27	12.52	Update BPS Jabar per Desember 2021
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)				
	SD	%	0.04	0.01	
	SMP	%	0.12	0.19	
	ANGKA LULUSAN (AL)				
	SD	%	99.30	100.00	
	SMP	%	97.58	99.97	
	Paket A Setara SD	%	88.50	95.00	
	Paket B Setara SMP	%	88.00	95.00	
	Paket C Setara SMA	%	88.89	80.00	
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100.00	100.00	
	ANGKA MELANJUTKAN				
	SD ke SMP	%	113.32	100.00	
	GURU LAYAK MENGAJAR				
	TK	%	76.84	71.92	
	SD	%	97.60	97.00	
	SMP	%	98.50	98.2	
	RASIO GURU PER SISWA				
	TK	%	11.00	15.00	
	SD	%	21.00	23.00	
	SMP	%	16.00	17.00	
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK				
	TK	%	93.20	60.36	
	SD	%	64.58	70.42	
	SMP	%	70.79	80.5	

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Akumulasi	Rencana Sesuai Renstra	Keterangan
	TERAKREDITASI				
	TK	%	72.59	72.59	
	SD	%	97.60	98.00	
	SMP	%	89.80	87.58	
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				
	SD	%	81.02	79.55	
	SMP	%	80.00	77.77	
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH				
	PAUD	%	100.00	100.00	
	SD	%	100.00	100.00	
	SMP	%	69.46	69.46	